
ASIMETRI INFORMASI DAN PENEKANAN ANGGARAN MEMODERASI PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN PADA SENJANGAN ANGGARAN

Saparudin Noor

Universitas Islam Sultan Agung

Devi Permatasari

Universitas Islam Sultan Agung

Osmad Mutaheer

Universitas Islam Sultan Agung

Muhammad Jafar Shadiq

Universitas Islam Sultan Agung

Alamat: Jln. Raya Kaligawe Km 4, Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis : saparudinnoorhyn@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the effect of budget participation on Budgetary Slack, to examine the moderating effect of budget emphasis on budget participation and Budgetary Slack, to examine the moderating effect of information asymmetry on budget participation and Budgetary Slack. This type of research is quantitative. The population in this study is the Regional Development Planning Agency, Research and Development of West Kotawaringin Regency. The sample in this study was all employees involved in the budget preparation process at the Regional Development Planning Agency, Research and Development of West Kotawaringin Regency, totaling 39 respondents. The research data were collected using a questionnaire and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that budget participation had a positive and significant effect on budgetary slack. Budget participation and information asymmetry did not individually affect budgetary slack, and information asymmetry was not a moderating variable. Budget participation and information asymmetry individually affected budget emphasis, and budget emphasis was a moderating variable.*

Keywords: *Budgetary Slack, Budget Participation, Budget Emphasis.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap *Budgetary Slack*, untuk menguji pengaruh moderasi penekanan anggaran terhadap partisipasi anggaran dan *Budgetary Slack*, untuk menguji pengaruh moderasi asimetri informasi terhadap partisipasi anggaran dan *Budgetary Slack*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 39 responden. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan asimetri informasi bukan merupakan variabel moderating. Partisipasi anggaran dan asimetri informasi berpengaruh secara individual terhadap penekanan anggaran, dan penekanan anggaran merupakan variabel moderating.

Kata kunci: *Budgetary Slack, Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran*

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah mencakup DPRD dan kepala daerah yang bekerja sebagai mitra sejajar

dalam mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DPRD bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), penganggaran, dan pengawasan, sementara kepala daerah melaksanakan fungsi eksekutif, Prinsip otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem desentralisasi dan dekonsentrasi juga diterapkan untuk penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian wilayah administratif terdiri atas daerah provinsi yang dibagi menjadi daerah kabupaten/kota, dan selanjutnya dibagi lagi menjadi kecamatan, kelurahan, dan desa, dengan masing-masing daerah memiliki status administratif dan wilayah kerja untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Undang-undang ini telah mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam mengatur anggaran daerah. Dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dan wilayah administratif yang terkait dengan kepentingan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan *Good Governance* dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan akuntabilitas kinerja berdasarkan *Clean Government*. Menurut World Bank (1994), *Good Governance* adalah komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang sehat, pelayanan publik yang efisien, dan masyarakat sipil yang kuat; hal ini juga berarti memastikan bahwa korupsi diminimalkan, pandangan kelompok minoritas diperhitungkan, dan suara kelompok paling rentan di masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Definisi ini menekankan perlunya pemerintah bersikap efektif, transparan, akuntabel, dan inklusif dalam operasionalnya.

Namun dalam pelaksanaannya, untuk mencapai *Good Governance* dan *Clean Government* sangatlah tidak mudah. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat serta usaha yang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Maka, pemerintah merumuskan kebijakan dalam berbagai program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya tentu saja memerlukan anggaran. Menurut Sulistyawati et al., (2023) anggaran adalah pernyataan formal oleh manajemen mengenai rencana masa depan untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan rencana tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas selama periode tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penganggaran seringkali sengaja dilakukan distorsi dengan cara mengurangi pendapatan anggaran dan meningkatkan pengeluaran anggaran untuk memudahkan pencapaian tujuan anggaran (*Budgetary Slack*) (Sulistyawati et al., 2023). Hal ini dilakukan agar

target anggaran tetap rendah sehingga mudah dicapai dan memberikan gambaran bahwa kinerja pemerintah semakin baik dan dipandang baik oleh masyarakat (Sopanah et al., 2023).

Kondisi *Budgetary Slack* dapat terjadi ketika pemerintah memiliki lebih banyak dana daripada yang dibutuhkan untuk mengelola urusan pemerintahan. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan antara anggaran yang disetujui dengan anggaran yang diperlukan, atau adanya kelebihan dana yang tidak digunakan secara efektif. Dalam beberapa kasus, *Budgetary Slack* dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus lain, *Budgetary Slack* dapat juga digunakan untuk meningkatkan korupsi dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari terjadinya korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah ternyata mengalami *Budgetary Slack* hal ini terlihat dari Tabel 1.1 dibawah yang mana pada tahun 2019 dan 2020 pemerintah daerah menetapkan target pendapatan yang tinggi namun merealisasikan pendapatan yang lebih rendah dan menetapkan anggaran belanja yang tinggi namun belanja yang terealisasi lebih rendah dan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 pemerintah daerah menetapkan target anggaran lebih rendah namun merealisasikan pendapatan lebih tinggi sedangkan anggaran belanja ditetapkan lebih tinggi dari pada realisasi belanja. Hal yang serupa dapat ditemukan pada Tabel 1.2 yang mencakup data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan menjadi objek penelitian ini. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022, target pendapatan lebih tinggi daripada realisasi pendapatan. Sedangkan pada tahun 2023 target pendapatan lebih rendah daripada realisasi pendapatannya. Selama 5 tahun tersebut (2019 -2023) terlihat bahwa anggaran belanja yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi belanja.

. Ketidakselarasan ini mencerminkan adanya senjangan dalam anggaran yang disusun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya keinginan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan mudah dicapai, atau adanya ketidakpastian dalam estimasi pendapatan dan belanja. Hal ini bisa berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
TA.2019 sd TA.2023**

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
--------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------

2019	1.462,36	1.357,38	92,82	1.446,65	1.391,69	96,2
2020	1.600,93	1.449,01	90,51	1.690,28	1.442,47	85,34
2021	1.489,84	1.633,97	109,67	1.489,84	1.461,58	98,1
2022	1.393,01	1.412,98	101,43	574,2	573,13	99,81
2023	1.500,64	1.594,00	106,22	1.519,57	1.621,07	106,68

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2020&provinsi=15&pemda=04>

**Tabel 1.2 : Realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan TA. 2019 sd TA. 2023**

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
2019	84.000,00	65.192,50	77,61	11.826.673,00	11.321.237,57	95,73
2020	93.500,40	24.250,00	25,94	7.005.992,90	6.592.545,63	94,1
2021	77.686,00	6.000,00	7,72	7.647.731,72	7.372.510,04	96,4
2022	93.500,00	38.400,00	41,07	11.088.417,00	10.747.344,68	96,92
2023	93.500,00	113.100,00	120,96	18.189.015,00	17.944.920,22	98,66

Sumber : Laporan Keuangan Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat TA.2019 sd 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 Tahun 2021, 2022 dan 2023 di atas terlihat adanya *Budgetary Slack*, dimana pada pendapatan terlihat bahwa realisasi lebih besar dari pada target yang ditetapkan. Sedangkan pada belanja terlihat bahwa realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada Tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2023 realisasi pendapatan lebih besar target pendapatan yang ditetapkan dan belanja lebih rendah dari pada anggaran yang ditetapkan.

Pertimbangan etis sangat diperlukan dalam proses penyusunan anggaran agar dapat mengambil keputusan yang tepat dengan memperhatikan prinsip nilai etika dan prinsip moral. Apabila setiap individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran memiliki hal tersebut maka *Budgetary Slack* dapat dicegah.

Budgetary Slack terjadi dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah adanya Partisipasi Anggaran (*Budgetary Participation*). Berdasarkan hasil penelitian Sulistyawati et al., (2023) Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Budgetary Slack*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sopanah et al., 2023), (Ernawaty et al., 2012). Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri Zulaika (2022) bahwa, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap kesenjangan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten, maka penelitian ini mencoba meneliti kembali pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap *Budgetary Slack* dengan Asimetri Informasi (*Information Asymetry*) dan Penekanan Anggaran (*Budget Emphasis*) sebagai variabel moderasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas (sebab akibat), yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probabilitas yaitu Convenience Sampling (Pemilihan Sampel Kemudahan). Convenience Sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti (Hartono, 2004).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *Budgetary Slack* (Senjangan Anggaran) (Y). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *Budgetary Participation* (Partisipasi Anggaran) (X). Penelitian ini memiliki 2 variabel moderasi, yaitu Information Asymmetry (Asimetri Informasi) (Z^1) dan *Budget Emphasis* (Penekanan Anggaran) (Z^2).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi moderasi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan adanya variabel moderasi.

Sebelum melakukan uji regresi moderasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data, yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta analisis regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Responden

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan dinamika, tantangan,

dan keputusan yang diambil selama proses penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 39 orang.

Tabel 1
Rincian Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah sampel	39	100%
2.	Kuesioner yang disebar	39	100%
3.	Data yang tidak lengkap	-	-
4.	Data yang Kembali	39	100%

Berdasarkan **Tabel 1**, jumlah kuesioner yang diberikan langsung kepada konsumen terdapat 39 eksemplar. Kuesioner yang kembali lengkap 39 dan yang tidak lengkap atau tidak diisi tidak ada. Responden dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria atau karakteristik tertentu, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja.

Deskripsi terkait berdasarkan jawaban kuesioner yang telah terkumpul adalah sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebesar 25 responden (64,1%). Hampir setengah respon berusia 37-43 tahun sebesar 17 responden (43,6%). Sebagian besar responden berpendidikan terakhir S1 sebesar 29 responden (74,44%). Sebagian besar responden memiliki lama kerja lebih dari 15 tahun.

2. Hasil Pengujian Instrumen

Uji validitas adalah ukuran yang dapat menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument (indikator) dalam penelitian. Jika valid dapat diartikan bahwa instrument data digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 39 orang responden agar setiap butir pertanyaan dalam kuesioner memiliki tingkat validitas yang dapat diandalkan.

Dapat diketahui bahwa r hitung untuk semua item yang digunakan pada variabel *Budget Emphasis* (M2) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan untuk mengukur variabel *Budget Emphasis* (M2) adalah valid, artinya semua item dapat digunakan untuk mengukur penilaian untuk mencapai *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Alat untuk mengukur

reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila: Hasil $\alpha > 0,70$ = reliabel dan Hasil $\alpha < 0,70$ = tidak reliabel (Ghozali,2011). dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari variabel kualitas produk (Y), (X), (M1) dan (M2) ialah memiliki nilai lebih dari yang disyaratkan untuk reliabel yaitu 0,7. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di setiap item pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam penelitian serta akan mendapatkan data yang sama meskipun dilakukan perhitungan berulang kali.

3. Hasil Uji Hipotesis

a) Uji F

Uji signifikan antara variabel (X1), (X2) dan (X3) dituliskan sebagai berikut:

Tabel 2
Uji F

	Sig.	F
Regression	0,000	23,554

Sumber : Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai F hitung sebesar 23,554. dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi dan Penekanan Anggaran sebagai Variabel Moderasi terhadap senjangan anggaran.

b) Uji T

- 1) Analisis Regresi Sederhana (Partisipasi Anggaran (X) terhadap Senjangan Anggaran (Y))

Tabel 3
Analisis Regresi Sederhana

	t	Sig.
Partisipasi Anggaran	3,692	0,001

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan data tabel tersebut, nilai signifikansi untuk partisipasi anggaran sebesar 0,001 yang berarti tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berperan signifikan terhadap senjangan anggaran.

Beberapa penelitian yang sejalan dengan hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan Abdullah et al., (2023), Ernawaty et al., (2012), Sopanah et al., (2023). Semakin besar

keterlibatan agen dalam penyusunan anggaran, maka semakin cenderung menciptakan target anggaran yang mudah dicapai, yaitu dengan menciptakan senjangan anggaran.

- 2) Pengaruh Partisipasi Anggaran Dengan Variabel Moderasi Asimetri Informasi Terhadap Senjangan Anggaran.

Tabel 4
Hasil Uji Parsial t (X, M1 dan Y)

	t	Sig.
Partisipasi Anggaran*Asimetri Informasi	-1,880	0,068

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat terlihat bahwa variabel moderat 1 yang merupakan interaksi antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,068. Hal ini menunjukkan signifikansi untuk moderat 1 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti menerima H_0 dan menolak H_2 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan variabel asimetri informasi bukan merupakan variabel moderating.

Kemungkinan terjadinya asimetri informasi di lingkungan pemerintahan sangat kecil, dikarenakan dalam anggaran sektor publik seperti di pemerintah daerah sudah terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat termasuk aturan yang terkait dengan informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya mengenai kondisi anggaran.

Didukung dengan Lisa Ardila (2013) menyatakan bahwa Partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi sebagai pemoderasi. Syamsuri Rahim (2019) menyatakan bahwa asimetris informasi tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran padan senjangan daerah.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Latif et al., 2020), (Ernawaty et al., 2012), (Abdullah et al., 2023). Partisipasi anggaran yang dikombinasikan dengan asimetri informasi agen cenderung semakin menciptakan senjangan anggaran.

- 3) Pengaruh Partisipasi Anggaran Dengan Variabel Moderasi Penekanan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran.

Tabel 4.2

Hasil Uji Parsial t (X, M2 dan Y)

	t	Sig.
Partisipasi	-2,508	0,017
Anggaran*Penekanan		
Anggaran		

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat terlihat bahwa variabel moderat 1 yang merupakan interaksi antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan signifikansi untuk moderat 2 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti menolak H_0 dan menerima H_3 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi antara partisipasi anggaran dengan penekanan anggaran berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan penekanan anggaran merupakan variabel moderating.

Budget Emphasis merupakan tekanan kepada bawahan yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal menjalankan anggaran dengan baik dan sering menebar ancaman berupa sanksi jika anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta bisa memberikan reward jika ada bawahan yang melampaui target yang ditetapkan (Sholehah & Ishak, 2023). Keterlibatan agen dalam penyusunan anggaran (partisipasi anggaran) diharapkan akan meningkatkan akurasi (sesuai dengan kebutuhan) dan komitmen (tanggung jawab) terhadap anggaran yang disusun. Namun, dengan adanya penekanan anggaran yang kuat akan menyebabkan semakin besar pula tekanan yang dirasakan agen dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Sehingga mendorong agen untuk menciptakan senjangan anggaran untuk menghindari kegagalan dalam pencapaian target yang ditetapkan principal.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sulistyawati et al., (2023), dimana semakin tinggi partisipasi anggaran dengan disertai penekanan anggaran yang tinggi pula maka akan semakin meningkatkan *Budgetary Slack*

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pegawai Bappedalitbang Kotawaringin Barat ini memiliki hasil penelitian yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Partisipasi

Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran dengan nilai signifikansi 0,001. Karena, partisipasi penganggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Partisipasi anggaran dan asimetri informasi tidak berpengaruh secara individual terhadap senjangan anggaran, dan asimetri informasi bukan merupakan variabel moderating dengan tingkat signifikansi sebesar 0,068 yang berarti tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Kemungkinan terjadinya asimetri informasi di lingkungan pemerintahan sangat kecil, dikarenakan dalam anggaran sektor publik seperti di pemerintah daerah sudah terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat termasuk aturan yang terkait dengan informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya mengenai kondisi anggaran. (3) Partisipasi anggaran dan asimetri informasi berpengaruh secara individual terhadap penekanan anggaran, dan penekanan anggaran merupakan variabel moderating dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017 yang berarti tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

Penelitian selanjutnya penulis menyarankan agar menggunakan instrument pengumpulan data yang lebih banyak sehingga data lebih valid seperti wawancara dan sebagainya

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S., Meutia, R., & Fatimah, F. (2023). The Influence of Budget Participation, Information Asymmetry, and *Budget Emphasis* on Budgetary Slack in Aceh Government. *International Journal of Current Science Research and Review*, 6, 6461–6472. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i9-36>
- Ernawaty, Selmita Paranoan, & Sugianto. (2012). Analisis Budaya Organisasi dan Asimetri Informasi dalam Senjangan Anggaran. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 334-501.
- Israr, N.H., Sofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i1.25321>
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Latif, M., Suwandi, M., & Akuntansi, J. (2020). Pengaruh *Budget Emphasis* dan Asimetri Informasi Terhadap Kesenjangan Anggaran dengan Locus of Control sebagai Pemoderasi (Studi Pada OPD Kabupaten Gowa). *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 94–111.
- Nuryadi, Astuti, T.D., Utami, E.S., Budiantara, M. (2017). Dasar – Dasar Statistik Penelitian (1). Sibuku Media.
- Pramudiati, N., Putri, A.Z., Prastiwi, B. (2022). Determinants Budgetary Slack. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.34889>

- Sari, A. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Budget Emphasis dan Komitmen Organisasi Terhadap Budgeting Slack*. 08(03), 21–32.
- Sholehah, N. L. H., & Ishak, P. (2023). Dampak Turbulensi Lingkungan, Self-Esteem dan *Budget Emphasis* Terhadap Budgetary Slack. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(1), 163–173.
- Sopannah, A., Bahtiar Sulistyan, R., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Job Relevant Information : Model Partisipasi Anggaran, Kinerja Manajerial dan Budgetary Slack. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 18–34. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i1>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (25). Alfabeta
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian* (12). Alfabeta
- Sulistyawati, A. I., Yulianti, Y., & Mulyantomo, E. (2023). Pengaruh Budget Participation Terhadap Budgetary Slack dengan Dimoderasi *Information Asymetry* dan *Budget Emphasis*. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 764–773. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1173>
- Zulaika, N. (2022). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kapasitas Individu, dan Job Relevant Information (JRI) Terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4615–4624.